

## LAPORAN SINGKAT KOMISI XI DPR RI

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPAPAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), DAN BUMN (PRIVATISASI)**

---

Rapat Ke : 12  
Tahun Sidang : 2021-2021  
Masa Persidangan : II  
Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja / ke-4  
Dengan : 1. Menteri Keuangan RI  
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
3. Menteri Dalam Negeri RI  
4. Menteri PPN/Kepala Bappenas  
5. Komite IV DPD RI

Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Selasa, 23 November 2021  
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : 1. Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1 (hadir fisik)  
2. *Virtual/Video Conference*

Ketua Rapat : **H. DITO GANINDUTO, MBA**  
(Ketua Komisi XI DPR RI)

Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos  
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)

Acara : 1. Pengantar Ketua Rapat;  
2. Laporan Panja RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD);  
3. Pembacaan Naskah RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD);  
4. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Komisi XI DPR RI, Pemerintah, dan Komite IV DPD RI;  
5. Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD);

6. Penandatanganan Naskah RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
- Hadir : 1. ... orang dari 54 orang Anggota Komisi XI DPR RI;  
2. **SRI MULYANI INDRAWATI** (Menteri Keuangan) beserta jajarannya;  
3. **DHAHANA PUTRA** (Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Hukum dan HAM) beserta jajarannya;  
4. **AGUS FATONI** (Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri) beserta jajarannya;  
5. **RUDY SOEPRIHADI PRAWIRADINATA** (Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Bappenas) beserta jajarannya;  
6. **NOVITA ANAKOTTA** (Wakil Ketua Komite IV DPD RI);  
7. **AJIEP PADINDANG** (Anggota Komite IV DPD RI).

## I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan DPD RI dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI dan rapat dilakukan dengan kehadiran secara fisik dan secara virtual/*video conference*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 279 ayat (6) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 14.05 WIB dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.
2. Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan DPD RI diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan Laporan Panja RUU HKPD, Pendapat Akhir Fraksi-fraksi, Pemerintah, dan DPD RI, Pengambilan Keputusan, dan Penandatanganan Naskah RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Ketua Komisi menyampaikan pengantar Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan DPD RI.
2. Ketua Panja melaporkan mengenai hasil pembahasan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dibacakan oleh Ketua Panja, Bapak Drs. Fathan.
3. Pemerintah membacakan draft Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang dibacakan secara singkat oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Bapak Astera Primanto Bhakti.

4. Fraksi-fraksi menyampaikan Pendapat Akhir Mini mengenai RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :
  - a. Pendapat Akhir Mini Fraksi PDIP dibacakan oleh Bapak Musthofa dan Fraksi PDIP menyatakan **setuju** RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR RI).
  - b. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golkar dibacakan oleh Ibu Puteri Aneeta Komarudin dan Fraksi Partai Golkar menyatakan **setuju** RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR RI).
  - c. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Gerindra dibacakan oleh Bapak Kamrussamad dan Fraksi Partai Gerindra menyatakan **setuju** RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR RI).
  - d. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Nasdem dibacakan oleh Bapak Fauzi Amro dan Fraksi Partai Nasdem menyatakan **setuju** RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR RI).
  - e. Pendapat Akhir Mini Fraksi PKB dibacakan oleh Bapak Bertu Merlas dan Fraksi PKB menyatakan **setuju** RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR RI).
  - f. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat dibacakan oleh Ibu Vera Febyanthy dan Fraksi Partai Demokrat menyatakan **setuju** RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR RI).
  - g. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dibacakan oleh Ibu Anis Byarwati dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan **menolak** hasil pembahasan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya dalam Rapat Paripurna DPR RI.
  - h. Pendapat Akhir Mini Fraksi Amanat Nasional dibacakan oleh Bapak Ahmad Yohan dan Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan **setuju** RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR RI).

- i. Pendapat Akhir Mini Fraksi PPP dibacakan oleh Ibu Wartiah dan Fraksi PPP menyatakan **setuju** RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR).
5. Pendapat Akhir Mini Pemerintah yang diwakili dan dibacakan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati dan Pemerintah menyatakan menerima hasil pembahasan RUU di tingkat Panja yang menjadi dasar pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat I serta **sepakat** RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR).
6. Pendapat Akhir Mini Komite IV DPD RI yang dibacakan oleh Ibu Novita Anakotta dan Komite IV DPD RI menyatakan **setuju** RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR).
7. Berdasarkan hasil Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, Komisi XI DPR RI Pemerintah, dan Komite IV DPD RI menyetujui RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR RI).
8. Naskah Batang Tubuh dan Penjelasan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan perwakilan masing-masing Fraksi kecuali Fraksi PKS.

### III. PENUTUP

Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan DPD RI ditutup pada pukul 17.00 WIB.

Jakarta, 23 November 2021

**PIMPINAN KOMISI XI DPR RI  
KETUA RAPAT,**

ttd

**H. DITO GANINDUTO, MBA**